

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum Ilmu Administrasi Publik merupakan studi yang mempelajari bagaimana mengelola administrasi secara lebih spesifik yang khususnya mempelajari administrasi pemerintahan dan unsur-unsur di dalamnya baik dalam pilar ruang lingkup dunia pemerintahan maupun dunia swasta atau perusahaan swasta yang memiliki ikatan erat dengan unsur pemerintahan itu sendiri. Ilmu Administrasi Publik mempelajari seluruh proses yang dilakukan organisasi maupun perseorangan, yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum atau peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta peradilan atau yudikatif, terutama bagaimana proses kebijakan tersebut diterapkan.

Menurut Hicks (dalam Hughes, 1994) sektor publik menyediakan pelayanan barang dan jasa yang cakupan dan jenisnya tidak ditentukan oleh keinginan langsung konsumen akan tetapi oleh badan-badan pemerintah.

Di bidang administrasi tidak bisa lepas dari pengumpulan data dan pengolahan data. Jurusan administrasi publik saat ini tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mempelajari bagaimana memanfaatkan kecanggihan teknologi dan komunikasi untuk meneliti, menganalisa dan mencari solusi seputar masalah implementasi kebijakan.

Teori principal agency merupakan teori yang diilhami oleh teori political control of bureaucracy. Sudut pandang baru ini secara luas diaplikasikan untuk mempelajari hubungan mengenai principal (elected official) yang berada dalam

ranah politik (policy) diantaranya legislatif, presiden, gubernur, bupati atau walikota dengan agent (appointed official) yang berada dalam ranah administrasi dalam hal ini adalah birokrasi. Teori principal agency juga mempelajari dalam kerangka untuk memahami hubungan antara Pemerintah sebagai principal dengan pihak lain sebagai agent untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah (Federickson & Smith, 2003 : 35).

Di dalam perusahaan swasta masih ada keterkaitan dengan Ilmu Administrasi Publik yang mana dapat diharapkan dapat memiliki keterampilan dalam menganalisa dan mengevaluasi penerapan sebuah solusi atau kebijakan. Keterampilan ini sangat penting untuk membantu perusahaan apa pun dalam menetapkan jalur yang akan mereka tempuh demi kemajuan mereka di masa depan. Oleh sebab itu dalam hal ini bagaimana dan sejauh mana perbedaan sistem atau model administrasi yang diadopsi dari Ilmu Administrasi Publik yang berkaitan dengan model administrasi di sektor-sektor sebuah perusahaan swasta.

PT. Murni Jaya Sentosa ialah sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang pelayanan barang berupa pallet berstandar ekspor dan jasa dalam bentuk penerbitan Sertifikasi International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM No. 15) dengan nomor 15 adalah simbol “Pertanian” dengan dibawah perlindungan badan pemerintah yakni “BARANTAN” (Badan Karantina Pertanian Indonesia) yang mana perusahaan ini berlokasi di Perumahan Puri Surya Jaya Cluster Nagoya Blok G3 No. 22, Kecamatan Gedangan-Kabupaten Sidoarjo wilayah Jawa Timur.

Sedangkan *Phytosanitary* adalah proses sertifikasi kesehatan tumbuhan yang digunakan untuk membuktikan bahwa pengiriman komoditas dari negara

pengeskspor ke negara pengimpor telah memenuhi persyaratan yang telah dikembangkan oleh badan yang dibentuk IPPC (*International Plant Protection Convention*) yang secara langsung menangani kebutuhan untuk mengubah bahan kayu dengan ketebalan > 6 mm (lebih dari enam milimeter) yang digunakan untuk mengirimkan produk antarnegara seperti pallet, case, crate, dunnage, dll (yang terbuat dari bahan kemasan kayu). Tujuan utamanya adalah untuk mencegah transportasi internasional dan penyebaran penyakit serta serangga yang dapat mempengaruhi semua bahan kemasan kayu yang mengharuskan bahan *debarked* (yang telah dipisah dan bebas dari kulit kayu) dan kemudian dipanaskan atau difumigasi dengan metil bromida dan dimarking atau stampel dengan tanda kepatuhan yang telah ditetapkan secara resmi oleh badan dunia IPPC (*International Plant Protection Convention*). Tanda kepatuhan ini disebut marking atau stampel gandum. Sedangkan produk yang dikecualikan oleh International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM No. 15) terbuat dari bahan alternatif seperti produk kertas, plastik atau panel kayu (OSB, hardboard, dan kayu lapis).

Pada tahun 2009 International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM No. 15) mensyaratkan bahwa kayu yang digunakan untuk memproduksi ISPM harus memenuhi syarat pengemasan kayu yang dibuat dari kayu yang dilepas agar tidak dikacaukan dengan kayu bebas kulit. ISPM (International Standard for Phytosanitary Measures) dimutakhirkan untuk mengadopsi peraturan pembatasan kulit kayu yang diusulkan oleh Uni Eropa pada tahun 2009. Negara Australia bertahan selama ± 1 tahun (kurang lebih satu tahun) dengan pembatasan kulit kayu yang lebih ketat sebelum memenuhi 1 Juli 2010. Bahan pengemasan kayu

harus dibuang sebelum dipanaskan atau difumigasi untuk memenuhi peraturan International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM No. 15). Komponen *debarking* (yang telah dipisah dan bebas dari kulit kayu) dari peraturan ini adalah untuk mencegah adanya hewan serangga saat jumlah sedang diproduksi. Definisi resmi untuk kayu International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM No. 15) tahun 2009 adalah :

“terlepas dari jenis perawatan yang diterapkan, bahan kemasan kayu harus dibuat dari kayu yang sudah dicabut kayu. Untuk standar ini, sejumlah kecil potongan kayu yang terpisah secara visual dan berbeda dapat tetap ada jika lebar < 3 cm, dengan total luas permukaan satu batang kulit < 50 cm”

Pada tahun 2010 PT. Murni Jaya Sentosa telah mendaftarkan perusahaan ke Badan Karantina Pertanian Indonesia sebagai perusahaan swasta dalam menyediakan kemasan kayu sesuai dengan persyaratan International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM No. 15). Pada bulan Juli 2010 PT. Murni Jaya Sentosa telah diregistrasi (didaftarkan) oleh Badan Karantina Pertanian Indonesia dengan nomor registrasi ID-108 untuk wilayah layanan Jawa Timur. Perusahaan ini telah mengembangkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan dengan standard yang ditetapkan oleh pelanggan, khususnya berkenaan dengan pemenuhan terhadap International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM No. 15).

Saat ini perusahaan PT. Murni Jaya Sentosa mempunyai 3 (tiga) fasilitas produksi dengan kapasitas produksi 10.000 (sepuluh ribu) pallet per bulan dengan berbagai ukuran dan standard, khususnya pallet untuk komoditas orientasi ekspor.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas pada Karya Tulis Ilmiah Skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja regulasi hubungan Pemerintah sebagai Principal dengan Perusahaan sebagai Agent atau Principal Agent Dalam Penerbitan sertifikat ISPM No. 15 yang mengatur di dalam PT. Murni Jaya Sentosa ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh PT. Murni Jaya Sentosa dalam menerbitkan sertifikat ISPM No. 15 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dan Manfaat Umum

- 1.1 Untuk mengetahui bagaimana Principal Agent Dalam Penerbitan Sertifikat ISPM No. 15 Oleh Badan Karantina Pertanian Indonesia kepada perusahaan PT. Murni Jaya Sentosa.
- 1.2 Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendorong penerapan Principal Agent Dalam Penerbitan sertifikat ISPM No. 15 terhadap sebuah perusahaan swasta yang terkait.

2. Tujuan dan Manfaat Khusus

- 2.1 Bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta memperoleh bekal ilmu dan pengalaman dalam ruang lingkup ilmu Administrasi Publik mengenai kebijakan pemerintah terhadap perusahaan swasta.

- 2.2 Mampu mengasah keterampilan dan menerapkannya di dunia kerja dengan didukung pengalaman dalam bidang keilmuannya selama di ruang lingkup bangku perkuliahan.
- 2.3 Mengetahui secara lebih spesifik mengenai sertifikat ISPM No. 15 yang diterapkan PT. Murni Jaya Sentosa sebagai Agent dari Principal tujuan Pemerintah.